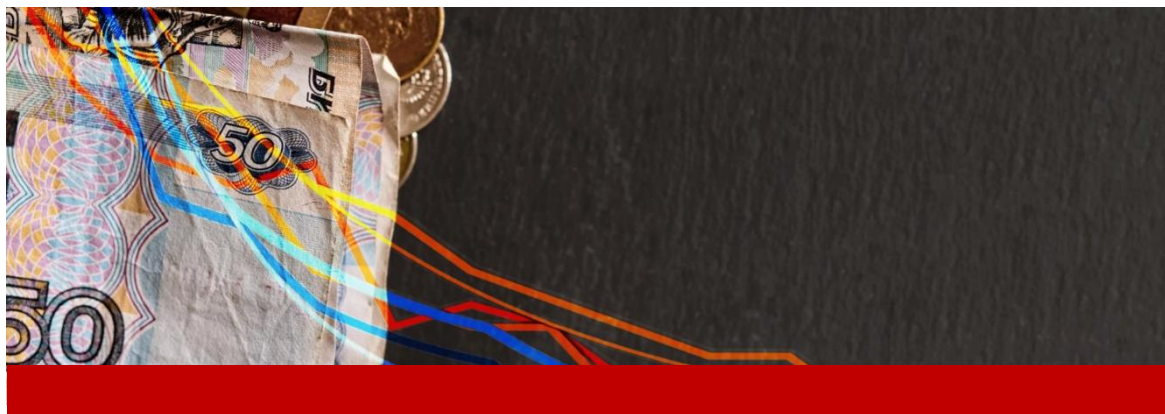


MENJAGA PEMULIHAN DI TENGAH ANCAMAN RESESI GLOBAL



Setelah mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi setelah masa pandemi Covid-19, pertumbuhan ekonomi global tahun ini kembali tertekan akibat tingginya harga komoditas, pengetatan moneter oleh bank sentral, dan perlambatan ekonomi Cina akibat penerapan kebijakan *zero tolerance* Covid-19.

Dampak tingginya harga komoditas telah menyebabkan inflasi di berbagai negara. Di Uni Eropa inflasi telah mencapai 8,9 persen pada bulan Juli, yang sebagian besar disumbangkan oleh inflasi energi yang naik tiga kali lipat dibandingkan tahun lalu serta inflasi bahan pangan. Sementara itu, inflasi di AS juga terus meningkat selama satu semester tahun ini dan mencapai puncaknya pada Juli yang mencapai 9,1 persen.

Harga minyak mentah akan menjadi faktor utama yang menentukan seberapa besar tingkat inflasi global sepanjang tahun ini. Harga minyak mentah jenis Brent hingga akhir Juli masih tertahan di kisaran 100 dollar per barrel, meskipun memperlihatkan tren penurunan dibandingkan awal Juni lalu, sejalan dengan potensi resesi di beberapa negara. Pemberian sanksi oleh AS dan Uni Eropa kepada Rusia berupa pembatasan ekspor minyak mentah dan gas negara itu, menyebabkan disrupsi pasokan kedua komoditas itu di pasar global. Sementara itu, OPEC+ — terdiri dari 24 negara eksportir minyak, termasuk Rusia dan Iran dan menguasai 55 persen produsen global—tetap menjaga agar tambahan pasokan mereka tidak terlalu tajam mengoreksi harga minyak saat ini.

Sementara itu, harga batubara tetap berada pada level 450-an dollar akibat beberapa negara di Eropa terpaksa beralih ke komoditas itu yang sejalan dengan menurunnya pasokan migas dan belum tersedianya pasokan energi khususnya LNG sebagai alternatif atas gas yang berasal dari Rusia.

Namun, pelemahan ekonomi akibat lonjakan inflasi tersebut, yang berpotensi menyebabkan resesi di berbagai negara, akan memberikan tekanan ke bawah harga komoditas tersebut dalam beberapa bulan ke depan. Apalagi permintaan negara-negara berkembang, khususnya Cina, diperkirakan masih cukup lemah sepanjang tahun ini. Tahun ini ekonomi negara itu diperkirakan hanya tumbuh di kisaran 4 persen.

Di samping itu, tekanan inflasi pangan juga akan mengalami penurunan sejalan dengan penurunan yang cukup signifikan beberapa harga komoditas pangan. Harga gandum, misalnya, diperkirakan akan kembali ke level sebelum perang Rusia-Ukraina, sejalan dengan masuknya masa panen di beberapa negara Amerika Utara, dan kesepakatan antara Rusia dan Ukraina mengenai pembukaan koridor ekspor gandum melalui Odessa. Meskipun demikian, tingkat harga tahun ini masih jauh lebih tinggi dibandingkan tahun lalu setelah permintaan global meningkat tajam pasca meredanya pandemi global.

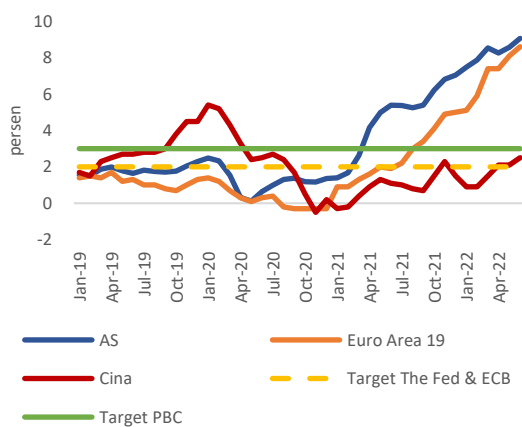
Tingginya tingkat inflasi tahun-tahun ini telah berdampak pada melambatnya proses recovery di berbagai negara setelah berakhirnya pembatasan sosial akibat Pandemi Covid-19. Inflasi telah mengakibatkan penurunan permintaan konsumen khususnya barang-barang non esensial, seperti barang-barang tahan lama. Penurunan tersebut selanjutnya berdampak pada turunnya kegiatan industri manufaktur dan impor.

Kebijakan sejumlah bank sentral yang melakukan pengetatan moneter untuk meredam inflasi—yang jauh melampaui target mereka—juga akan mengerem laju pertumbuhan ekonomi tahun ini. Dalam satu semester pertama tahun ini, The Fed telah menaikkan *Federal Fund Rate* sebanyak 150 basis point (sebelum 28 Juli 2022). Kenaikan tersebut diperkirakan masih akan berlangsung sejalan dengan proyeksi inflasi AS yang masih akan bertahan di atas dua persen hingga tahun depan. European Central Bank untuk pertama kalinya sejak September 2019 menaikkan suku bunga acuannya sebesar 50 basis point.

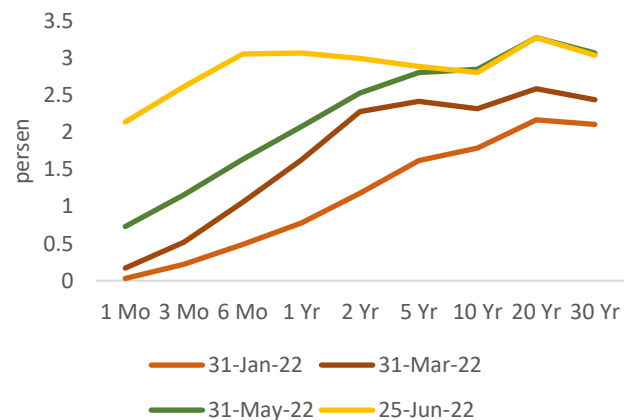
Alhasil, dampak dari inflasi yang tinggi dan disertai dengan pengetatan moneter tersebut berpotensi mendorong beberapa negara ke jurang resesi. Meskipun demikian, potensi resesi di AS diperkirakan tidak akan terlalu tajam dibandingkan dengan resesi selama masa pandemi. Pasalnya, inflasi diperkirakan telah mencapai puncaknya pada bulan Juni. Di sisi lain, tingkat pengangguran terus mengalami penurunan ke level 3,6 persen, atau telah kembali pada level sebelum

masa pandemi. Sementara itu, potensi resesi di beberapa negara di Uni Eropa berpotensi lebih dalam. Pasalnya, selain menghadapi harga komoditas energi yang masih sangat tinggi, beberapa negara mengalami keterbatasan *supply* pasokan gas, baik untuk rumah tangga dan industri, termasuk potensi penghentian pasokan gas dari Rusia. Sementara itu, alternatif pasokan dari luar Rusia masih menghadapi kendala keterbatasan infrastruktur.

Grafik 1. Indeks Harga Konsumen di AS, Euro Area, dan Cina



Grafik 2. Kurva Par Yield Treasury Harian Pemerintah AS

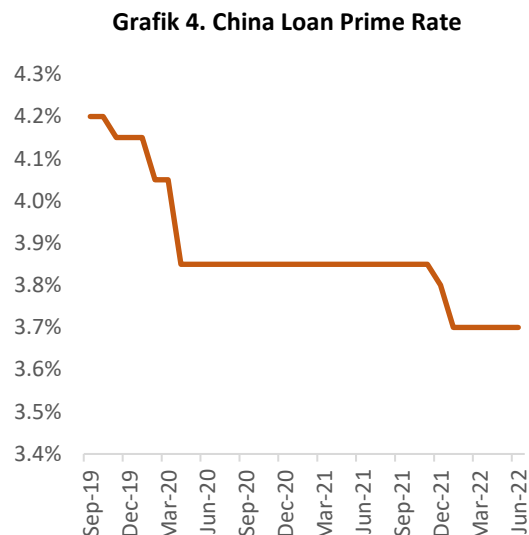
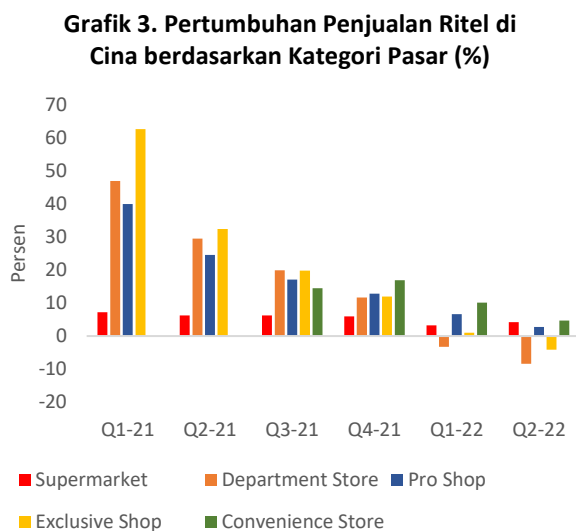


Sumber: OECD, U.S. Department of The Treasury

Tekanan terhadap pertumbuhan ekonomi global juga disebabkan oleh perlambatan ekonomi Cina. Kebijakan pemerintah yang menerapkan *zero tolerance Covid-19 policy*, seperti melakukan *lockdown* di beberapa kota secara ketat telah mengakibatkan tersendatnya mobilitas publik. Dampaknya kegiatan ekonomi terutama konsumsi swasta dan investasi tertekan. Di samping itu, sektor properti yang menjadi salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi Cina, hingga saat ini belum mampu melakukan ekspansi akibat restrukturisasi utang yang masih berlanjut ditambah dengan penjualan sektor properti yang juga melambat akibat kebijakan pembatasan sosial.

Meskipun demikian, upaya Pemerintah Cina yang berkomitmen mencapai pertumbuhan ekonomi tahun ini sebesar 5,5 persen, akan mengerem laju penurunan ekonomi yang lebih dalam. *People Bank of Cina*, misalnya, sejak awal tahun telah melakukan pelanggaran kebijakan moneter seperti menurunkan *prime lending rate* dan cadangan wajib minimum sektor perbankan. Dari sisi fiskal, Pemerintah Cina juga masih melanjutkan pemberian insentif seperti pengurangan hingga separuh pajak untuk perusahaan skala kecil (RMB 1 juta < 3 juta), pengurangan pajak untuk mendukung manufaktur, usaha kecil dan berpenghasilan rendah, seperti pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

usaha skala kecil untuk jangka waktu tertentu. Selain itu, pemerintah juga menaikkan belanja infrastruktur tahun ini sebesar 18 persen dibandingkan tahun lalu.



Sumber: National Bureau of China Statistics, People Bank of China

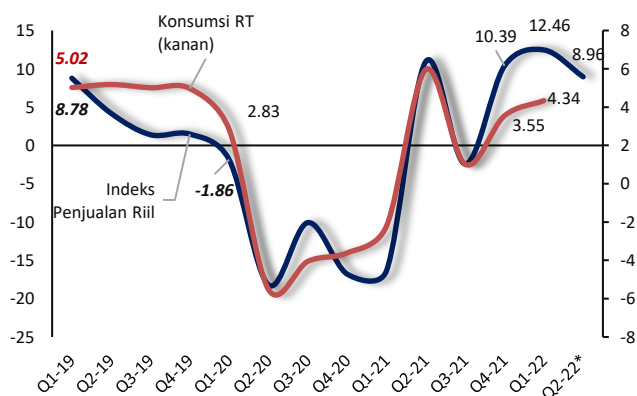
Dengan tekanan global yang cenderung meningkat, **CORE Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada triwulan kedua akan berada pada kisaran 4,5 – 5,0% secara year on year.** Selanjutnya pada semester kedua tahun ini secara year on year berada di kisaran 4,0 – 4,5%. Dengan kata lain, melambat dibanding pertumbuhan PDB pada triwulan pertama yang mencapai 5,01%. Dengan demikian, **pertumbuhan PDB secara keseluruhan tahun 2022 akan berada di kisaran 4,5 – 5,0%**, atau masih sejalan dengan prediksi dengan yang kami sampaikan pada CORE Economic Outlook 2022.

Perlambatan Pemulihan Ekonomi Domestik

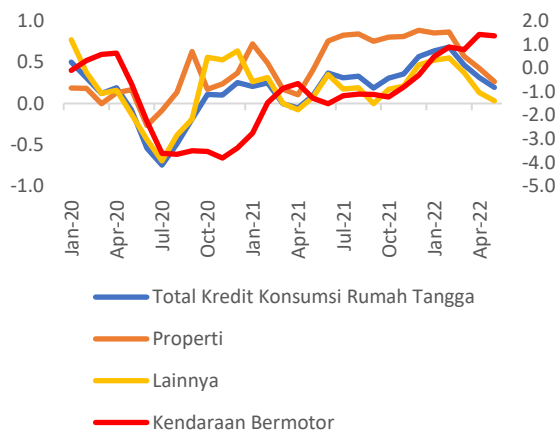
Kenaikan harga komoditas primer, khususnya pangan dan energi, dan potensi resesi di berbagai negara termasuk di negara-negara yang menjadi tujuan ekspor utama Indonesia akan memberikan dampak yang relatif kecil pada pertumbuhan ekonomi tahun ini. Ini dengan catatan, jika kebijakan-kebijakan pemerintah dan bank sentral masih akomodatif untuk menjaga pertumbuhan ekonomi domestik. Kebijakan pemerintah menjaga agar tingkat inflasi, khususnya yang disumbangkan oleh *administered price*, seperti BBM dan listrik, akan menjaga tingkat inflasi di bawah lima persen tahun ini. Demikian pula, jika Bank Indonesia relatif lebih akomodatif terhadap pemulihan ekonomi tahun ini, tekanan eksternal yang disebabkan oleh potensi resesi global akan lebih ringan dampaknya.

CORE memperkirakan pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada semester kedua tahun ini diperkirakan masih tumbuh positif meskipun tidak sekuat semester pertama. Pengaruh pandemi terhadap mobilitas sudah tidak ada lagi, seperti mobilitas masyarakat sudah jauh lebih tinggi dibandingkan dengan sebelum masa pandemi. Namun, inflasi dalam satu semester tahun ini, mencapai 3,19 persen (ytd)—jauh lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu (0,74)—cukup menghambat belanja masyarakat sepanjang tahun ini. Apalagi sumbangan terbesar inflasi tersebut berasal dari bahan makanan, yang menjadi basket terbesar konsumsi masyarakat menengah ke bawah. Perlambatan konsumsi masyarakat tercermin pada pertumbuhan Indeks Penjualan Riil (IPR) kuartal kedua yang tumbuh 8,96 persen, melambat dibandingkan kuartal sebelumnya yang tumbuh 12,46 persen. Beberapa indikator konsumsi, seperti penjualan motor dan mobil, juga mencatatkan pertumbuhan yang lebih rendah. Penurunan konsumsi tersebut juga terlihat dari melambatnya persetujuan kredit konsumsi rumah tangga dalam 5 bulan terakhir (grafik 6). Di samping itu, berbagai insentif yang mendorong pertumbuhan konsumsi masyarakat, seperti bantuan sosial juga telah menurun. Pendapatan petani khususnya perkebunan sawit juga mulai tertekan akibat penurunan tajam pada harga komoditas tersebut.

Grafik 5. Pertumbuhan Tahunan Indeks Penjualan Riil dan Konsumsi Rumah Tangga



Grafik 6. Pertumbuhan Kredit Rumah Tangga (MA. 3 months)



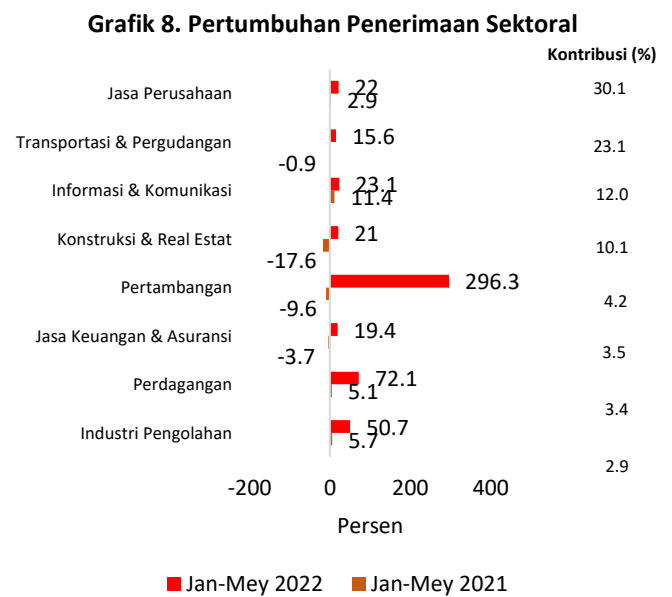
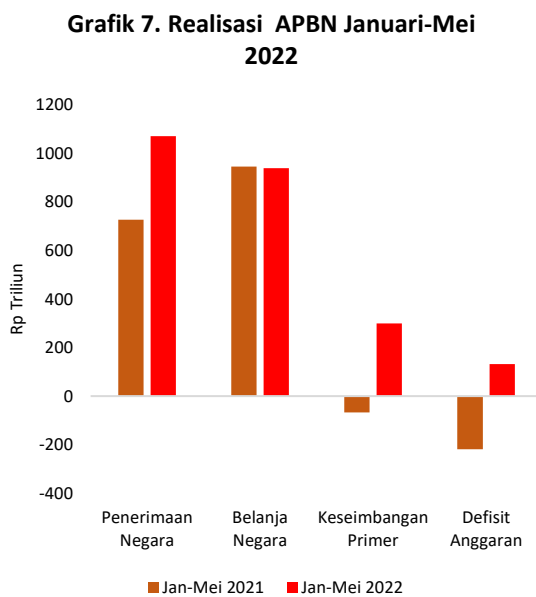
Sumber: BPS, Bank Indonesia, diolah

Konsolidasi Fiskal Berpotensi Terhambat

Sepanjang satu semester tahun ini, kondisi fiskal relatif lebih solid dibandingkan tahun lalu. Hal ini tercermin pada penerimaan APBN yang jauh lebih tinggi hingga Mei 2022 dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Di samping itu, pengeluaran pada periode yang sama juga lebih rendah. Penurunan tersebut tidak lepas dari upaya pemerintah untuk menurunkan target defisit kembali ke tiga

persen, menyebabkan pertumbuhan belanja APBN tumbuh -0,7 persen, dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Penurunan terbesar terjadi pada belanja modal, Belanja Barang, Bantuan Sosial, Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Dampak kebijakan tersebut menyebabkan APBN dan Keseimbangan Primer hingga Mei 2022 mencatatkan surplus masing-masing sebesar 132 triliun dan 299 triliun (grafik 7).

Kenaikan harga komoditas di pasar global telah mengerek penerimaan perusahaan-perusahaan di sektor pertambangan dan industri pengolahan yang berbasis sektor pertambangan dan energi. Pertumbuhan pendapatan terbesar, berasal peningkatan penerimaan seluruh komponen pajak, seperti PPh 22 Impor, PPh Badan, PPN Impor, dan PPN. Sementara jika ditinjau dari sisi sektoral, sumbangan terbesar berasal dari sektor pertambangan yang tumbuh hampir 300 persen, disusul sektor perdagangan, dan sektor industri pengolahan (grafik 8). Namun, pada semester kedua pertumbuhan penerimaan negara diperkirakan akan mulai berkurang sejalan dengan menurunnya harga beberapa komoditas, khususnya palm oil dan batubara.



Sumber: Kementerian Keuangan, diolah

Di sisi lain, harga minyak yang diperkirakan masih cukup tinggi pada semester kedua juga akan meningkatkan realisasi belanja subsidi yang ditanggung pemerintah. Sebagai gambaran asumsi ICP pada APBN 2022 sebesar 63 sementara realisasi ICP telah mencapai lebih dari 100 per barrel, atau naik hampir 60 persen. Selain itu, potensi tekanan di pasar keuangan pada semester kedua, khususnya setelah terjadinya pengetatan moneter di AS dan beberapa

negara lainnya, akan menyebabkan biaya belanja pembayaran bunga utang meningkat, baik akibat pelemahan nilai tukar rupiah ataupun peningkatan suku bunga utang atau yield obligasi. Potensi kenaikan jumlah penduduk miskin akibat peningkatan inflasi juga akan berdampak pada peningkatan realisasi Belanja Bantuan Sosial. Dengan demikian, realisasi defisit secara keseluruhan masih berpotensi berada pada kisaran 3,5-4,5 persen.

Potensi Penyempitan Surplus Perdagangan

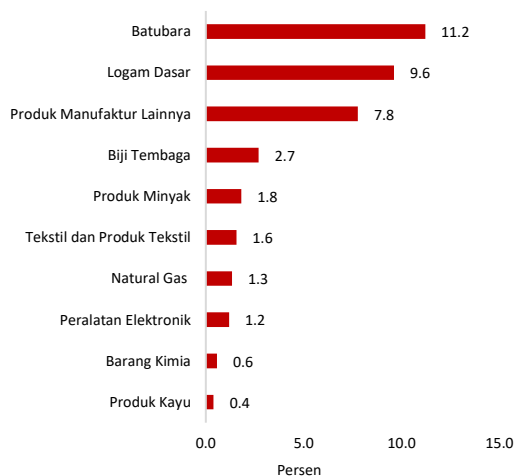
Pertumbuhan ekspor pada periode pertama tahun 2022 lebih tinggi dibandingkan dengan tahun lalu. penyebab utamanya adalah kenaikan harga berbagai komoditas, terutama sektor pertambangan dan industri yang berkaitan dengan sektor pertambangan (Grafik 9). Meskipun demikian, dari sisi volume, selain sektor pertanian yang masih tumbuh positif meskipun di bawah tahun lalu, ekspor industri manufaktur dan pertambangan menunjukkan pertumbuhan negatif.

Ke depan diperkirakan pertumbuhan dari sisi ekspor akan mengalami tekanan bukan hanya dari sisi volume tetapi juga dari sisi harga, yang telah memperlihatkan tren penurunan pada beberapa minggu terakhir, sejalan dengan potensi resesi global, terutama yang terjadi di AS, Uni Eropa, dan Asia, yang menjadi pangsa pasar utama ekspor Indonesia.

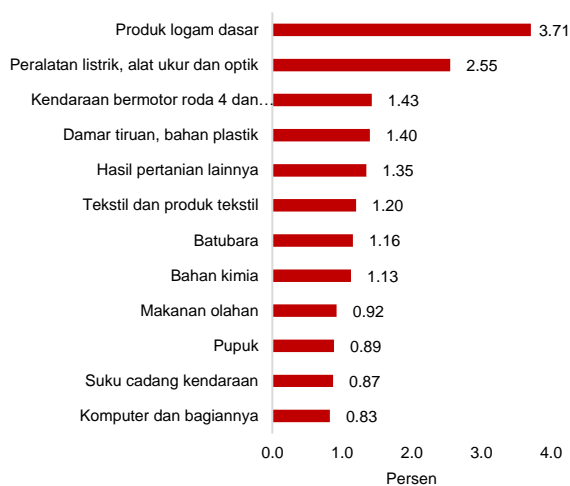
Dari sisi impor, meskipun terjadi peningkatan nilai impor yang tumbuh 29 persen, tetapi dari sisi volume terjadi penurunan, dimana dalam 5 bulan pertama, hanya tumbuh 0,5 persen. Penyebab kenaikan impor awal tahun ini adalah disebabkan oleh peningkatan harga barang-barang modal, khususnya minyak mentah dan BBM. sementara itu, bahan baku dan barang konsumsi mengalami penurunan dibandingkan tahun lalu. Turunnya permintaan konsumsi, dan tekanan pada industri manufaktur akibat melambatnya permintaan domestik dan ekspor, menyebabkan baik impor barang konsumsi dan bahan baku mengalami penurunan.

Alhasil, menurut CORE semester satu 2022 terjadi surplus yang lebih tinggi daripada tahun lalu, yang lebih banyak disebabkan oleh peningkatan nilai ekspor dibandingkan dengan volume ekspor. Di sisi lain, menurunnya permintaan pasar domestik dan ekspor Indonesia, serta permintaan impor baik dalam bentuk barang konsumsi ataupun bahan baku juga sedikit mengalami tekanan. Karena itu, CORE memperkirakan secara keseluruhan, sejalan dengan potensi pelemahan harga komoditas ditambah dengan penurunan volume ekspor, maka diperkirakan dalam enam bulan ke depan surplus ini akan berkurang cukup dalam sehingga kontribusi net ekspor terhadap PDB juga akan menurun.

Grafik 9. Komoditas Penyumbang Terbesar Pertumbuhan Ekspor, Jan-Mei 2022



Grafik 10. Barang Penyumbang Terbesar Pertumbuhan Impor Jan-Mei 2022



Sumber: BPS, diolah

Investasi Tetap Solid

Investasi langsung di Indonesia pada semester pertama dan sepanjang tahun 2022 masih berpeluang besar untuk tumbuh, kendatipun perekonomian global sedang tidak kondusif dan penuh ketidakpastian. Sinyal pertumbuhan investasi yang solid tercermin dari tingkat kepercayaan investor global yang masih terjaga untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Hal itu ditunjukkan oleh penanaman modal asing (PMA) pada triwulan kedua 2022 yang naik sebesar 39,8 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Prospek investasi di sektor jasa, industri manufaktur, dan primer kemungkinan besar tetap tumbuh. Di sektor jasa, investasi di sektor jasa Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi telah mengalami *rebound* sejalan dengan pelonggaran restriksi perjalanan. Pada Q1-2022 investasi di sektor ini mencapai Rp 39,5 triliun. Sektor jasa lainnya yang juga mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi adalah investasi Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran. Salah satu pendorongnya adalah pemberian potongan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) Rumah—sebesar 50 persen untuk rumah di bawah Rp 2 miliar dan 25 persen untuk harga di atas 2 miliar hingga 5 miliar, hingga September 2022. Sektor Listrik, Gas dan Air juga mendapat aliran investasi yang cukup signifikan yaitu sebesar Rp 23 triliun pada Q1-2022. Kenaikan tersebut berkorelasi dengan peningkatan investasi di sektor properti yang membutuhkan jaringan listrik, air, dan gas.

Sementara itu, investasi industri manufaktur, terutama industri Logam Dasar masih sangat prospektif, antara lain, disebabkan oleh masih tingginya permintaan turunan nikel, termasuk baterai dan kendaraan listrik. Investasi pada Makanan dan Minuman juga semakin membaik seiring pemulihan ekonomi dan pelonggaran mobilitas. Investasi kimia dan farmasi juga mengalami peningkatan akibat meningkatnya permintaan bahan kimia dan barang dari bahan kimia seiring pemulihan ekonomi. Rencana pemberian insentif pada 13 industri manufaktur berupa harga gas bumi maksimal USD 6 MMBTU juga berpotensi mendorong investasi dan daya saing industri-industri tersebut.

Adapun investasi di sektor primer, khususnya pada sektor pertambangan masih akan cukup kuat setidaknya pada semester I 2022, mengikuti perkembangan harga komoditas, walaupun ada potensi penurunan harga komoditas ke depan, namun harga komoditas di sepanjang 2022 kemungkinan besar masih berada di level yang lebih tinggi dibandingkan sebelum pandemi.

Selain prospek investasi pada sektor-sektor tersebut, juga terdapat investasi yang belum terealisasi di beberapa sektor yang telah mendapat *tax holiday*, namun masih terkendala perizinan usaha, lokasi usaha, dan pembiayaan bank. **Karena itu, CORE berpandangan pemerintah dapat memfasilitasi realisasi ceruk investasi dalam negeri yang masih tertahan tersebut.** Faktor lain yang juga penting adalah upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas pasar domestik. Jika melihat pada kondisi fiskal dan ruang moneter, sebetulnya keduanya masih cukup kuat. Pemerintah memang relatif mengetatkan fiskal di tahun 2022, namun jika keadaan darurat, ruang fiskal masih tersedia, ditambah *windfall* kenaikan harga komoditas juga dapat dimanfaatkan untuk menjaga kecondusifan perekonomian dalam negeri. Begitu pula dengan cadangan devisa Indonesia yang cukup kuat untuk menjaga nilai tukar.

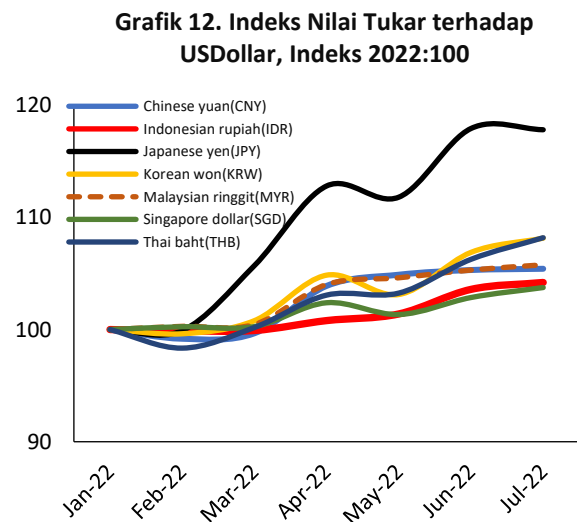
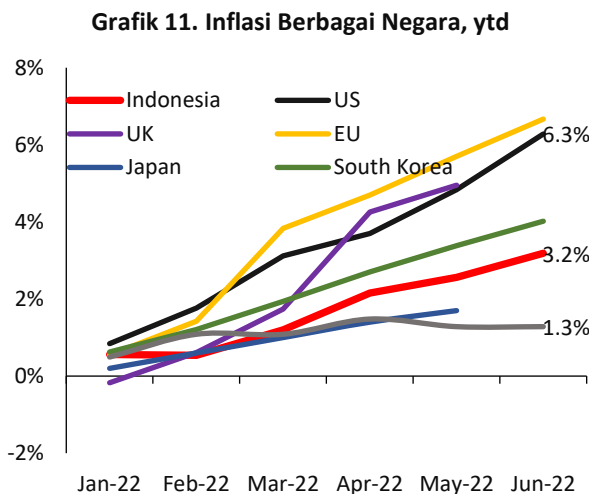
Dorongan Pengetatan Moneter

Kenaikan inflasi global yang merambat pada inflasi pada setiap negara mendorong sejumlah bank sentral menaikkan suku bunga acuan. The Fed menaikkan suku bunga *Federal Fund Rate* (FFR) sebesar 150 bps sejak Maret 2022 akibat inflasi Amerika Serikat yang meningkat mencapai 9,1 persen pada bulan Juni 2022, tertinggi dalam 41 tahun terakhir. Adanya *lag* transmisi kebijakan moneter menyebabkan kenaikan suku bunga acuan tersebut belum dapat meredam inflasi dalam jangka pendek dan pada saat yang sama akan menghambat permintaan domestik-akibat suku bunga kredit konsumsi dan investasi yang semakin mahal dan semakin tingginya suku bunga simpanan--

yang pada akhirnya mengakibatkan penurunan pertumbuhan ekonomi AS dalam beberapa kuartal ke depan.

Di sisi lain, kenaikan FFR mendorong penguatan dollar terhadap mata uang lainnya termasuk Rupiah. Hal ini mendorong aksi *greenback* sehingga terjadi *capital outflow* di beberapa negara, termasuk Indonesia. Aksi jual (*net sell*) oleh investor asing berlangsung selama bulan Maret hingga Juli baik di pasar saham maupun obligasi telah menyebabkan pelemahan rupiah hingga 5,4 persen terhadap dolar AS pada 22 Juli 2022 (ytd), sedikit lebih moderat. Meskipun demikian, apabila dibandingkan dengan negara lain di Asia, pelemahan Rupiah terhitung moderat. Jepang Yen, Korea Won, dan Thailand Bath bahkan melemah 20 persen, 10,1 persen, dan 9,7 persen terhadap dolar AS (ytd) (grafik 12).

CORE memperkirakan pergerakan rupiah masih akan berfluktuasi sejalan dengan isu kenaikan FFR sepanjang tahun ini. Meski demikian, BI akan tetap menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, salah satunya dengan menggunakan cadangan devisa. Penurunan cadangan devisa sejak Maret 2022 selain disebabkan oleh upaya stabilitas rupiah juga disebabkan oleh pembayaran bunga utang pemerintah dan jatuh tempo utang yang lebih besar dari tahun sebelumnya. Disisi lain, cadangan devisa di bulan Juni meningkat akibat penerbitan *global bond* sebesar Rp 55,8 triliun, menjadi US\$136,38 miliar.



Sumber: IMF, diolah

Di samping itu, lonjakan inflasi lebih lanjut berpotensi terjadi jika pemerintah melakukan pengurangan subsidi untuk barang-barang yang masuk dalam kategori *administred prices*. Dengan demikian, inflasi tahun ini, yang pada Juni telah mencapai 3,19 persen (ytd), berpotensi melampau target Bank Indonesia yaitu 3 ± 1 persen. Relatif rendahnya inflasi Indonesia saat ini dibandingkan

CORE Indonesia
merupakan akronim dari
Center of Reform on
Economics.

Kami adalah *think-tank*
independen yang fokus
pada penelitian dan
konsultasi di bidang
ekonomi, industri,
perdagangan,
pembangunan wilayah
dan kebijakan publik.



www.coreindonesia.org

Jl. Tebet Barat Dalam
Raya No. 76A, Jakarta
Selatan, Indonesia
12810



T: +6221 2298 3998
F: +6221 2283 7424

E-mail:
info@coreindonesia.org

dengan sejumlah negara lain, antara lain disebabkan oleh dua hal. Pertama, kenaikan harga di tingkat produsen belum ditransmisikan sepenuhnya oleh produsen pada harga konsumen. Kedua, yang paling utama, pemerintah masih mempertahankan barang-barang subsidi untuk tetap diberikan subsidi.

Oleh sebab itu, CORE berpandangan, jika kedua faktor tersebut masih terjaga maka inflasi tahun ini diproyeksikan berada di kisaran 5 persen dan sebaliknya, apabila produsen secara penuh mentransmisikan kenaikan biaya produksi kepada konsumen dan pemerintah menaikkan harga barang-barang *administered prices* maka inflasi dapat mencapai lebih dari 6 persen.

Dengan skenario terjadi pelemahan rupiah lebih lanjut dan inflasi telah melampaui target Bank Indonesia (BI), maka akan terdapat peluang bagi otoritas moneter tersebut untuk menaikkan suku bunga acuannya. Meskipun demikian, BI tentu akan memastikan perkembangan inflasi domestik—yang sebagian besar berasal dari *supply side*—dan faktor-faktor lainnya agar tidak mengganggu proses pemulihan ekonomi pasca pandemi. Apalagi, sejauh ini BI telah melakukan *tightening policy* dengan melakukan normalisasi likuiditas dan menaikkan giro wajib minimum (GWM) perbankan secara bertahap sejak Maret 2022. Meskipun demikian, kinerja sektor perbankan masih dalam jalur *recovery* pasca pandemi, yang ditandai dengan pertumbuhan kredit mencapai 10,7 persen (yoy) pada Juni 2022, serta rasio permodalan dan likuiditas yang masih cukup melimpah. Dengan kondisi tersebut, bantalan menghadapi tekanan resesi global relatif cukup solid.